

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL (SIUP-MB)**

SKRIPSI

Oleh :

NUR HIDAYATUL FITRIYAH

NIM. C02212034



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayatul Fitriyah
NIM : C02212034
Fakultas/ Jurusan/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Prodi Judul Skripsi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-
MB)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2016
Saya yang menyatakan,

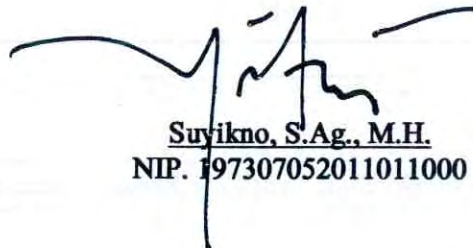


Nur Hidayatul Fitriyah
NIM. C02212034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayatul Fitriyah NIM. C02212034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2016
Pembimbing,



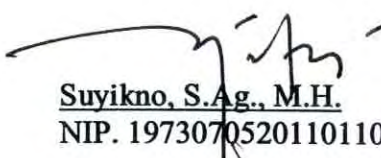
Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011000

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayatul Fitriyah NIM. C02212034 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

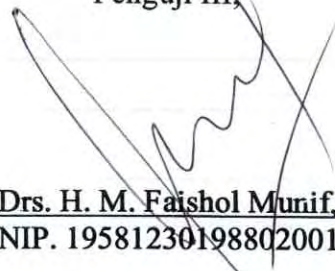
Penguji I,


Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011000

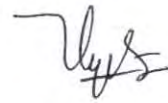
Penguji II,


Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji III,


Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 19581230198802001

Penguji IV,


R.A. Vidia Gati, SE., Akt., MEI. CA.,
NIP. 197605102007012030

Surabaya, 15 Agustus 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HIDAYATUL FITRIYAH
NIM : C02212034
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM/MUAMALAH
E-mail address : ryaelniera@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA
SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2016

Penulis

(Nur Hidayatul Fitriyah)

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	ʔ
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	'
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah ber*harokat* sukun atau didahului oleh huru yang ber*harakat* sukun. Contoh: *khamr* (خمر)

2. Vokal Rangkap (*diftog*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَيّ	<i>Fathah dan ya'</i>	ay	a dan y
اَوّ	<i>Fathah dan wawu</i>	aw	a dan w

Contoh: *Al-Bay'* (البيع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>Fathah dan Alif</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِيّ	<i>Kasrah dan ya'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
أُوّ	<i>Dammah dan Wawu</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh: *Mu'āmalah* (معاملة)

Ta'zīr (تذير)

C. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya menjadi *t*.

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *Siyāsah Syar'iyah* (سياسة شرعية)

Fiqh Jināyah (فقه جنایة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

larangan yang terdapat dalam Perda tersebut, tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena masih memperbolehkan minuman golongan A. Dalam hukum pidana Islam yang berupa hukum dera 40 kali (*had*) dan atau ditambah dengan 40 kali (*ta'zir*). meskipun berbeda, keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak mengulangnya lagi.¹⁵

2. Muh Wildan Fatkhuri dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Perda Minuman Keras terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. Penelitian tersebut membahas tentang efektifitas Perda tersebut terhadap Tindak Kriminal yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda masih belum efektif, dikarenakan adanya faktor-faktor yang masih menghambat jalannya Perda tersebut. Diantaranya masih ada peran aparat penegak hukum dalam pengamanan bisnis minuman keras dan adanya faktor hukuman yang rendah serta tidak adanya peran aktif masyarakat dalam membantu pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo. Dan dari kontribusi *fiqh jināyah* dapat terlihat bahwa peran pendidikan agama, melalui keluarga, pendidikan formal dan informal sangat dibutuhkan guna membentuk suatu kepribadian yang

¹⁵ Yuanita Sholikhah, “Studi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kecuali kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Disebutkan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP. selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui:

- a. UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap), bagi SIUP kecil yang diberikan kepada perorangan;
- b. Dinas, bagi SIUP kecil yang diberikan kepada badan usaha, SIUP menengah dan SIUP besar.

SIUP kecil adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP menengah adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP besar adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas/UPTSA dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
- c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- d. surat penunjukan Kepala Cabang (bagi perusahaan cabang);
- e. fotocopy SIUP Kantor Pusat perusahaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIUP (bagi perusahaan cabang);
- f. fotocopy dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan (bagi perusahaan cabang);
- g. pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.

Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud diatas, harus ditandatangani oleh pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan SIUP, maka selain melampirkan persyaratan pemohon harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan dan fotocopy kartu tanda penduduk penerima kuasa.

Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

Dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 39 ayat (4) bahwa Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada hotel bintang 3,4, dan 5 atau surat izin usaha restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klub malam:
 - 1) surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung;
 - 2) SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda

talam kencana dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub atau kelab malam dari instansi yang berwenang;

- 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - 4) TDP (tanda daftar perusahaan);
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 6) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 7) fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - 8) rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
- b. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen):
- 1) surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol;
 - 2) rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - 4) SIUP kecil atau menengah;
 - 5) TDP (tanda daftar perusahaan);

- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 7) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- 8) fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- 9) rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

Mekanisme penyelesaian permohonan SIUP-MB dijelaskan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 40 sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan surat permohonan SIUP-MB kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) sesuai dengan SIUP-MB yang dimohon;
- b. petugas loket pada Dinas menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
- c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
- e. petugas loket pada Dinas menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
- f. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri:
- 1) meneliti kelengkapan berkas permohonan;
 - 2) melakukan peninjauan ke lokasi usaha, apabila persyaratan yang dilampirkan telah lengkap dan benar dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - 3) menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan, apabila permohonan tidak disetujui karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Perdagangan;
 - 4) menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep SIUP-MB, apabila permohonan disetujui dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- g. Kepala Bidang Perdagangan memeriksa, meneliti, dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan atau konsep

dilarang karena dzatnya yang menurut para ulama adalah najis dan salah satu syarat barang yang diperjualbelikan itu harus suci dan dapat dimanfaatkan, sedangkan *khamr* adalah najis dan tidak ada manfaatnya.

Dalam peraturan walikota penjualan minuman beralkohol diperbolehkan dalam tempat-tempat tertentu yang telah dicantumkan dalam pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yaitu penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:

1. Hotel dengan tanda bintang 3,4,5.
2. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka.
3. Klub malam.
4. Pub/rumah musik.

Dan bagi penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

Dalam pasal 41 peraturan walikota menyatakan bahwa pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % (lima puluh lima persen). Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.

tidak diperbolehkan dimanapun tempatnya tidak ada batasan diperbolehkannya penjualan *khamr*, di dalam teori jual beli semua barang yang najis dan memabukkan dilarang diperjualbelikan dimanapun tempatnya dan berapapun jumlahnya baik sedikit ataupun banyak, apalagi dengan adanya surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, kalau dalam hukum Islam tidak ada hukum yang membolehkan penjualan minuman beralkohol yang memabukkan yang disebut *khamr*. Sedangkan dalam peraturan walikota masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu yang telah disebutkan.

Banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol dalam Islam disebut *khamr*, salah satu dampak buruknya adalah ketika seseorang itu mabuk atau kehilangan akalunya masyarakat disekitarnya akan merasa terganggu ketentraman dan kemanannya, apalagi bagi orang muslim khususnya di Surabaya yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam bahkan banyak yang merantau di Surabaya juga orang Islam baik yang bekerja ataupun menempuh pendidikan tinggi di Surabaya. Meskipun ada juga penduduk dan perantau dari luar Surabaya ataupun dari Surabaya sendiri yang non muslim, akan tetapi bagaimana pengawasan yang dijalankan pemerintah Surabaya bagi orang yang membeli minuman beralkohol di Surabaya di tempat-tempat yang disebutkan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010, sedangkan yang disebutkan dalam peraturan walikota Surabaya adalah larangan bagi yang berumur masih di bawah 21 tahun entah dia muslim atau non muslim tidak ada aturan yang menyebutkan hal itu di dalam

